

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi hutan mangrove telah dimuat dalam surat edaran dan intruksi Bupati Pohuwato nomor 01 tahun 2012 tentang larangan pembukaan lahan tambak dikawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. Serta mempertahankan kelestarian hutan mangrove dan merehabilitasi mangrove yang sudah mengalami kerusakan yang beralih fungsi menjadi tambak. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah mengoptimalkan fungsi ekonomi, sosial budaya dan ekologi hutan yang berorientasi pada pelestarian ekosistem mangrove dengan rencana mikro dan rencana makro.
2. Dalam konteks kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove di pengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor kominikasi, faktor sikap, faktor sumberdaya, dan faktor ekonomi masyarakat.

5.2 Saran

Disarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang sudah dialih fungsikan menjadi tambak dan secepatnya membentuk peraturan ataupun (Perda) dalam memanfaatkan dan melestarikan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. serta adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga stabilitas kawasan hutan mangrove yang ada di kabupaten pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalim, 2005: *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Edisi 1, Cet II, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan. 1992: *Informasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Edisi II 1992/1993. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Heinz Eulau, K Prewit, 1973, *Labyrinths of Democracy*, Indianapolis: Bobs Merrill
- Idris Sarong Al Mar.1993. *Penguatan Hutan Dan Aspek Aspek Hukum (Suatu Analisis Yuridis) Bagian 1*. Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, 1992/1993.
- Joe Fernandez, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*, harapan yang harus di perjuangkan, kumpulan bulletin cakap, vol,1, no. 1, januari 2001.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010: *Dua Lisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ramdan et al, 2003: *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Otonomi Daerah*. Bandung. Alqaprint.
- Rahardjo Adisasmita, 2010: *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983: *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, H,S, 2008: *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983: *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetrisno, K, Agung,M.S, 1994. *Pengembangan Aspek Social Ekonomi Pengusahaan Hutan Mangrove* . Panel Diskusi Pembangunan Hutan Mangrove Berkelanjutan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Supriharyono. 2000, *Pelestarian Dan Pngelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, Jakarta. Gramedia.
- Modul, *Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo*: 2011.

- Modul, *Pemetaan Neraca Dan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Skala 1:50.000*: 2009.
- Modul, *Atlas Mangrove Teluk Tomini*, Program Susclam, 2012.
- Skripsi Sudarmono, *Kajian Deskriptif Kawasan Hutan Mangrove Di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato*, Gorontalo, 2005
- Tesis Sudarmono, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato*, Makassar, 2009.
- Tesis Misran, *Analisis Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove Serta Pengaruhnya Terhadap Potensi Hasil Tangkapan Beberapa Jenis Krustasea Di Pesisir Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo*, Manado, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHPdt)*, Rhedbook Publisher, 2009.
- Undang-Undang No 4 Tahun 1982 *Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).**
- Undang-Undang No 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Keci Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove.*
- Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 *Tentang Pokok Kehutanan.*
- PP No 6 Tahun 2007 *Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.*
- [http://id.shvoong.com/writing - and - speaking / presenting/ 2202700-defenisi-kebijakan-menurut-para ahl i /xzz2IgWRzP](http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2202700-defenisi-kebijakan-menurut-para-ahli/xzz2IgWRzP), (22/01/2013).
- [http://worldhealth bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-mangrove-atau hutan-mangrove.html](http://worldhealthbokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-mangrove-atau-hutan-mangrove.html) (21/12/2012).
- <http://ainaachil.blogspot.com/2013/02/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> (16/07/2013).
- <http://dejavang.blogspot.com/2012/07/pengertian-kebijakan-publik.html> (16/07/2013).